

## EFEKTIVITAS HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA MELALUI PROGRAM AUSAID DI SEKTOR PENDIDIKAN ERA JOKOWI PADA TAHUN

**Jofanka Alfiano<sup>1\*</sup>, Putri Hergianasari<sup>2</sup>, Triesanto Romulo Simanjuntak<sup>3</sup>,  
Muhammad Fahmi<sup>4</sup>**

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia<sup>1,2</sup>

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia<sup>3</sup>

Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Indonesia<sup>4</sup>

Email: Jalfiano70@gmail.com<sup>1\*</sup>, Hergianasari.putri@staff.uksw.edu<sup>2</sup>,

Triesanto.simanjuntak@uksw.edu<sup>3</sup>, Fahmimuhammad103@gmail.com<sup>4</sup>

\*Correspondence Jofanka Alfiano

---

### INFO ARTIKEL

**Diajukan :** 18-06-2022

**Diterima :** 12-07-2022

**Diterbitkan :** 25-07-2022

**Kata kunci:** Pendidikan;  
Indonesia; Australia; AusAID

---

### ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas bagaimana hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Australia melalui AusAID yang menghasilkan berbagai program bantuan di sektor pendidikan pada era Joko Widodo pada tahun 2014-2019, yang mana penelitian ini akan melihat bagaimana efektivitas dari kerja sama tersebut. Indonesia memiliki permasalahan yang mendesak di sektor pendidikan. Hal ini disebabkan karena menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dan tingkat putus sekolah yang memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu adanya langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya melalui kerja sama dengan Australia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sendiri sudah terjalin sejak lama sehingga kerja sama di sektor pendidikan antara kedua negara dirasa dapat memberi manfaat. Pada dasarnya, Indonesia memiliki berbagai kebijakan di sektor pendidikan seperti wajib belajar 9 tahun dan pengembangan pendidikan karakter. Sementara itu, Australia memiliki kebijakan luar negeri di bidang pendidikan yang berfokus pada asistensi peningkatan kualitas pendidikan dan bantuan secara langsung. Kerja sama antara Indonesia-Australia di bidang pendidikan dapat dilihat dari berjalannya program seperti *Education Partnership*, *Technical Assistance for Education System Strengthening*, *ProDEP*, dan *Innovation for Indonesia's School Children*. Program kerja sama tersebut menghasilkan berbagai capaian seperti ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pelayanan pendidikan, peningkatan kurikulum metode belajar yang efektif, serta aksesibilitas kualitas pendidikan dalam mencapai kesetaraan gender dan ramah disabilitas. Penulis menggunakan teori Liberalisme untuk menjabarkan seberapa efektif kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia di sektor Pendidikan Indonesia melalui AusAID. Peneliti melihat bahwa kerja sama pendidikan antara Indonesia dengan Australia di era Joko Widodo cukup efektif untuk membantu mengatasi berbagai isu pendidikan di Indonesia.

### ABSTRACT

*This paper will discuss how the cooperative relationship between Indonesia and Australia through AusAID resulted in various assistance programs in the education sector during the Joko Widodo era from 2014 to 2019, in which this research will look at the effectiveness of the cooperation. Indonesia has pressing problems in the education sector. This is due to the declining quality of education in Indonesia and the alarming dropout rate. Therefore, it is necessary to take steps to improve the quality of education in Indonesia, one of which is through*

*cooperation with Australia. Bilateral relations between Indonesia and Australia have existed for a long time so cooperation in the education sector between the two countries is considered to be beneficial. Indonesia has various policies in the education sector such as 9-year compulsory education and character education development. Meanwhile, Australia has a foreign policy in the field of education that focuses on assistance in improving the quality of education and direct assistance. The cooperation between Indonesia and Australia in the field of education can be seen in the implementation of programs such as the Education Partnership, Technical Assistance for Education System Strengthening, ProDEP, and Innovation for Indonesia's School Children. The cooperation program resulted in various achievements, such as the availability of educational infrastructure and facilities, improving the quality of educators and educational services, improving the curriculum for effective learning methods, as well as the accessibility of education quality in achieving gender equality and being disability-friendly. The author uses Liberalism theory to describe how effective the cooperation between Indonesia and Australia in the Indonesian education sector is through AusAID. Researchers see that educational cooperation between Indonesia and Australia from 2014 to 2019 was effective in helping to overcome various educational issues in Indonesia*

**Keywords:** Education; Indonesia; Australia; AusAID



CC BY SA 2022

## Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang penting dan mendesak di Indonesia adalah pendidikan. Beberapa tahun lalu, akibat penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, data terkait pendidikan di dalam negeri dapat dikatakan memprihatinkan. Dibuktikan pada tahun 2018, jumlah pemuda Indonesia usia 15-24 yang mengikuti pendidikan atau pelatihan baru mencapai 48,7% dan sebanyak 20% remaja Indonesia berusia antara 15 dan 19 tahun tidak bersekolah, bekerja atau menerima pelatihan (Armarena, Syahrizal, Yuherman, & Asril, 2021). Hal ini dipicu oleh berbagai hal, seperti kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban pendidikan, rendahnya faktor ekonomi yang mengakibatkan tidak memenuhi kebutuhan pendidikan sehingga sulit untuk menciptakan daya saing dengan negara-negara lain.

Fakta terkait pendidikan tidak sebanding dengan pentingnya pendidikan bagi Indonesia. Pendidikan merupakan proses perantara bagi pembangunan semua sektor pembangunan (Naryoso, 2016). Dalam konteks pembangunan, pembangunan pendidikan mencakup empat aspek, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Solichin, 2015). Dalam konteks sosial, pendidikan mampu melahirkan manusia yang mampu membawa perubahan sosial dalam masyarakat dan mendorong akselerasi mobilitas masyarakat yang bermuara pada terbentuknya bentuk-bentuk sosial baru. Bentuk sosial baru berupa organisasi, komunitas, dan perkumpulan komunitas. Pada aspek budaya, pendidikan mampu menciptakan norma dan nilai sosial manusia, serta menanamkan semangat dalam masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat memiliki rasa toleransi yang tinggi dan menghormati keragaman budaya dan agama masyarakat lainnya. Aspek ekonomi pendidikan mampu melahirkan masyarakat yang cerdas dan andal sebagai penggerak

pembangunan ekonomi negara. Pada tataran politik, pendidikan dapat menjadikan manusia sebagai warga negara yang baik dan memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat (Soepandji, 2018).

Indonesia sudah memiliki hubungan kerja sama dengan Australia sejak awal kemerdekaannya. Hal ini dibuktikan dengan dukungan dan pengakuan kedaulatan Australia pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang mana hubungan ini semakin berkembang (Sunarti, 2016). Pada tahun 2010 terdapat kunjungan yang dilakukan secara berkala oleh kedua negara, Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh SBY sebagai Presiden dan Australia dipelopori oleh perdana menteri yaitu Julia Gillard membahas 28 poin kerjasama, salah satunya kerjasama dalam peningkatan pendidikan di masing-masing negara. Pemerintah Indonesia dan Australia telah merancang suatu program pembangunan pendidikan dalam rangka untuk pembangunan Internasional dengan badan Australia atau *Australian Agency for International Development* (AusAID) yang telah melakukan konsultasi dengan Departemen Pendidikan Nasional (DPN), Departemen Agama (DEPAG), Departemen Keuangan (Depkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna membangun rencana strategis untuk mencapai prioritas utama yaitu peningkatan akses pada pendidikan dasar, kualitas, standar, penguatan tata kelola pendidikan serta mekanisme akuntabilitas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan pembangunan pendidikan di Indonesia yang dilaksanakan pada Tahun 2010-2014 dan pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada tahun 2005-2025, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional telah (Kemdiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) pada 2005-2025. Hal ini telah tertuang pada Permendiknas No 32 Tahun 2005 yang mengatur pada Rencana Strategis atau disebut dengan Renstra Kemendiknas pada tahun 2005 hingga 2009 (Ma'mun, 2014).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan penulisan jurnal. Di mana pada penelitian sebelumnya melihat Kerjasama Australia Indonesia Melalui AUSAID Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2013. Dalam masa pemerintahan SBY kerjasama melalui AUSAID untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sangatlah baik, melihat fenomena yang terjadi pada saat itu Australia memberikan bantuan kepada Indonesia tidak hanya sektor pendidikan saja. Banyak program bantuan yang di jalankan untuk kemajuan pendidikan Indonesia demi membangun sumber daya manusia yang kompeten yang disalurkan melalui AusAID (Farida, 2014). Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan utama yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan teori Liberalisme sebagai alat untuk menganalisis efektivitas hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia di sektor pendidikan di era Jokowi pada tahun 2014-2019.

Penelitian ini dibuat untuk memahami dan melihat bagaimana efektivitas hubungan kerjasama Indonesia-Australia melalui program AusAID di sektor pendidikan era Jokowi pada tahun 2014-2019. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bacaan untuk penulisan makalah, jurnal, dan laporan terkait hubungan bilateral

antara Indonesia dan Australia pada sektor pendidikan, khususnya bagi peminat isu-isu Hubungan Internasional dalam Kerjasama Internasional (Pujayanti, 2016).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teori liberalisme, yang mana menurut Jackson dan Sorensen, terdapat tiga asumsi dasar Liberalisme, yaitu ; (1) pandangan positif terhadap sifat manusia; (2) memiliki keyakinan bahwa hubungan internasional memiliki sifat yang kooperatif dibandingkan konfliktual; (3) percaya terhadap kemajuan. Semakin tinggi tingkat kerjasama dan ketergantungan dibentuk maka semakin kecil peluang untuk terjadinya perang (Aurellia, Febriana, & Salaeh, 2019). Hal ini membuat pandangan Liberalisme melihat adanya suatu kebebasan negara dalam hal ini kebebasan untuk membangun diri dan mengembangkan guna mencapai kepentingannya (Triputra, 2017). Di sisi lain pandangan ini percaya bahwa manusia maupun negara memiliki *Self-interested* jika terjadi persaingan antara kebebasan dan juga kesetaraan maka negara akan berusaha mengembangkan diri dan memperbaharui untuk menjadi lebih baik. Melihat asumsi dasar yang dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen bahwa Liberalisme percaya akan kemajuan, penulis akan menjabarkan seberapa efektif kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia di sektor Pendidikan Indonesia melalui AusAID, dengan adanya kerjasama ini akan menciptakan kemajuan pada sektor pendidikan Indonesia dan mempererat hubungan negara antara Indonesia dan Australia.

Fenomena dalam Hubungan Internasional yang terjadi oleh negara-negara yakni untuk melihat bagaimana proses kerjasama Internasional dapat berjalan melalui hal-hal yang telah disepakati secara bersama guna mencapai kepentingan nasional masing-masing negara (Daniah & Apriani, 2018). Penulis juga menggunakan konsep kerja sama bilateral dalam penelitian ini. Dalam kerjasama Internasional, tercipta sebuah hubungan bilateral di mana hubungan ini merupakan keadaan yang mampu mendeskripsikan bagaimana hubungan timbal balik antar kedua negara yang terlibat, dan negara merupakan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral (Pratiwi, 2021).

Berdasarkan judul dan latar belakang, penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Pemilihan dalam penggunaan metode kualitatif bertujuan agar mampu memahami bagaimana suatu komunitas maupun individu dalam menerima isu tertentu. Sementara jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, hal ini bertujuan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang di mana untuk mendeskripsikan keadaan berdasarkan segala fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, organisasi, maupun negara (Ramadhana & Tanjung, 2021).

### **Hasil dan Pembahasan**

Indonesia dan Australia memiliki sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama yang panjang. Sejarah kerja sama antara kedua negara yang bertetangga tersebut dapat ditelusuri kembali pada awal kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap upaya pengakuan kemerdekaan Indonesia dengan membawa isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB dan keikutsertaan

Australia dalam menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda (Subchi & Halid, 2018). Sejak saat itu, hubungan antara Indonesia dengan Australia mulai terjalin walaupun mengalami pasang surut.

Selama lebih dari 70 tahun hubungan bilateral antara Jakarta dengan Canberra, kedua negara telah menjalin beberapa kerja sama di berbagai bidang untuk kemajuan bagi negara yang bertetangga tersebut, salah satunya kerja samanya adalah *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD) yang dikelola AusAID (Saragih et al., 2022). Selain itu terdapat *Agreement Between Australia and the Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation* yang merupakan kerangka kerja sama keamanan (Ansari, Utomo, & Farabi, 2016). Selanjutnya ada kerja sama *Joint Declaration on Maritime Cooperation* untuk bidang keamanan maritim (Pramitha, 2017).

Baik Australia dan Indonesia juga memperkuat hubungan antara keduanya dengan mengadakan berbagai forum, seperti *2+2 Dialogue*, *Annual Leaders Meeting* (ALM), dan *Indonesia-Australia Dialogue* (IAD). Dialog-dialog yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia bertujuan sebagai forum komunikasi utama secara bilateral, yang mana pemimpin bersama menteri dari kedua negara dapat berdiskusi terkait isu yang ada (Darmawan & Kuncoro, 2019). Berjalannya komunikasi antara kedua negara disebabkan karena Indonesia dianggap sebagai negara yang penting bagi Australia. Oleh karena itu, penting bagi kedua negara ini untuk menjaga kerja sama yang telah terjalin (Kristanto & Utomo, 2020).

Pada dasarnya, Indonesia memiliki beberapa kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Salah satu landasan kebijakan pemerintah Indonesia terkait program pendidikan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun (Irawati & Susetyo, 2017). Kebijakan program pendidikan pemerintah yang dilandaskan Undang Nomor 20 Tahun 2003 memiliki tujuan agar setiap anak berumur dari 7 hingga 16 tahun bisa mendapatkan hak pendidikan yang layak. Selain itu, pendidikan yang mudah dijangkau dan gratis bagi masyarakat menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakannya (Syafii, 2018).

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan berfokus pada pendidikan karakter sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya buku pelatihan dan pengembangan pendidikan budaya karakter bangsa oleh Kementerian Pendidikan, yang memuat 18 poin pendidikan karakter bangsa (ASRI, Rusmini, & Nugroho, 2021). Hal ini didukung juga dengan kebijakan pembangunan pendidikan Indonesia yang disusun dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan yang ada (Saggaf, 2016). Di era Joko Widodo, sektor pendidikan memiliki berbagai sasaran, seperti angka partisipasi pendidikan, pengentasan kesenjangan pendidikan dan putus sekolah, kesiapan siswa di dunia industri, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesejahteraan guru (Murdiyana & Mulyana, 2017).



Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia telah menghasilkan berbagai kesepakatan dan kerja sama bagi kedua negara. Salah satu fokus dalam kerja sama antara Indonesia dan Australia adalah di sektor pendidikan. Adapun bentuk kerja sama di sektor pendidikan dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui AusAID dan pemerintah Australia.

Pada tahun 2014 hingga tahun 2015, Australia menerapkan beberapa strategi kebijakan luar negeri di bidang pendidikan, salah satunya adalah dengan menyediakan *Official Development Assistance* (ODA) untuk menyalurkan investasi pendidikan di beberapa negara (Denimah, 2021). Sementara di masa kepemimpinan Malcolm Turnbull pada tahun 2015-2018, kebijakan luar negeri Canberra di bidang pendidikan mengacu pada strategi bantuan investasi Australia untuk pendidikan yang dijalankan pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Strategi tersebut memiliki empat prioritas, antara lain pondasi untuk pertumbuhan anak usia dini, meningkatkan kualitas pendidikan, partisipasi pendidikan yang universal, dan meningkatkan akses pengembangan kemampuan. Implementasi dalam mewujudkan prioritas strategi bantuan investasi Australia untuk pendidikan dilakukan melalui pengurangan jumlah dana investasi bantuan di bidang pendidikan, yang mana diakomodasi dengan peningkatan kuota beasiswa dan upaya meminimalisir intervensi Canberra dalam pembuatan kebijakan pendidikan di negara penerima bantuan (VITA INDAH, 2021).

Selain itu di masa Scott Morrison, bentuk kebijakan luar negeri Australia di bidang pendidikan lebih berfokus pada memberikan asistensi terhadap negara penerima bantuan agar dapat meningkatkan kualitas dan kapabilitas edukasinya. Asistensi tersebut diwujudkan dengan investasi yang digunakan untuk meningkatkan inovasi siswa, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan memperkuat sistem pendidikan (Medan et al., 2014).

Australia terlibat dalam program *Education Sector Support Programme* (ESSP) dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap program Rencana Strategis 2010-2014 milik Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Melalui bantuan sebesar lebih dari Rp10 triliun, Australia melaksanakan program *Education Partnership* (EP) yang dipengaruhi oleh keberhasilan program AIPRD tahun 2005-2010 dan berjalan pada tahun 2011-2016. Dana tersebut dialokasikan menjadi 5 komponen yang terkait dengan infrastruktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) (C1), infrastruktur dan pengelolaan madrasah (C2), bantuan akreditasi madrasah (C3), Pembangunan kapasitas dan fasilitas sekolah (C4), serta lintas komponen.

**Tabel 1. Alokasi Keuangan bagi EP (dalam juta AUD)**

<b>Komponen Program</b>	<b>Dana</b>
Konstruksi atau perluasan sekolah untuk meningkatkan penerimaan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) (C1)	179,3
Pembangunan dan pengelolaan madrasah / sekolah Islam (C2)	106,4
Bantuan akreditasi bagi madrasah untuk meningkatkan layanan dan kualitas sekolah (C3)	36,6

Bantuan pembangunan kapasitas dan fasilitas sekolah (C4)	20,0
Layanan konsultasi dan pengawasan pelaksanaan program	26,5
<b>Jumlah</b>	<b>368,8</b>

Sumber: AusAID, 2016 (diolah oleh penulis)

Dalam komponen C1, Pemerintah Australia dan Kemendikbud bekerja sama dalam membangun 1.155 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Satu Atap (SATAP) yang dapat menerima 160.000 siswa tambahan pada periode tahun 2011-2016. Bantuan dari Pemerintah Australia sebesar AUD 179,3 juta diberikan dalam bentuk dana ataupun bantuan teknis dan diselesaikan pada Januari 2017 Pada November 2016, di bawah komponen program C1, Pemerintah Australia dan Indonesia berhasil membangun 1.139 sekolah dan meningkatkan penerimaan siswa sebesar 150.000 orang. Berdasarkan hal tersebut, program EP berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan siswa hingga 1,6%. Di samping itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa konstruksi sekolah di bawah program EP memiliki standar konstruksi yang bagus sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang serta mengurangi beban pengelolaan bagi sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah (Patuju, 2018).

Sementara dalam komponen C2, terfokus pada pengembangan staf profesional pendidikan dan memiliki porsi terbesar kedua dalam program EP, dengan alokasi dana sebesar 29% atau AUD 106,4 juta. Diwujudkan melalui pelatihan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengembangkan kemampuan keuangan sekolah dan berkontribusi dalam komunitas. Didukung dengan pengembangan tenaga di sektor pendidikan. Program pengembangan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam mengelola lembaga pendidikan di Indonesia. Sejak pertama kali diimplementasikan pada tahun 2015, program pengembangan tenaga pendidikan dalam C2 telah melatih lebih dari 3,500 pengawas dan 17,775 kepala sekolah di Indonesia. Selain itu, AusAID juga membantu guru untuk mengembangkan inovasi sistem pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan siswa. Dibuktikan pada tahun 2018, yang mana Australia membantu pelatihan 2774 guru dan 446 tenaga pendidik dari 907 sekolah untuk meningkatkan pembelajaran bagi 77.912 siswa sekolah dasar.

Pada komponen C3, Australia memberikan hibah bersyarat sebesar AUD 10 ribu masing-masing kepada 1.500 sekolah dasar dan sekolah menengah madrasah dengan tujuan untuk membantu mempersiapkan mereka dalam akreditasi institusi. Program C3 dirumuskan untuk mendukung rencana strategis dari Kemenag yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas madrasah dan sistem pendidikan Islam (Ahmad & Sukiman, 2019). Program ini merupakan kelanjutan dari program bantuan AusAID sebelumnya, *Learning Assistance Program for Islamic Schools* (LAPIS). Kerangka akreditasi dan penerapan C3 dipegang oleh Kemenag yang kemudian dikelola melalui Mitra Pelaksana Sub-Nasional di provinsi tujuan.

Sedangkan pada komponen C4, Australia menerapkan Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis atau ACDP, sebuah kerangka yang

mempromosikan penelitian dan dialog kebijakan di sektor pendidikan. Pembuat kebijakan diharapkan dapat memanfaatkan kerangka analisis ACDP dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan penganggaran, lalu digabungkan dengan bukti dari ACDP dalam kebijakan sektor pendidikan yang relevan (Sardjunani, 2014).

Selain keempat komponen tersebut program EP juga memberikan asistensi terkait isu-isu lintas komponen atau yang tidak termasuk ke dalam keempat isu tersebut. Isu-isu yang termasuk lintas komponen antara lain penyeimbangan gender aktivitas pelatihan pendidikan, yang mana 54 persen dari peserta merupakan tenaga didik perempuan. Tidak hanya itu, isu lintas komponen juga meliputi kesetaraan akses pendidikan, khususnya bagi kaum disabilitas, dibuktikan melalui implementasi program C1 yang mengharuskan infrastruktur pendidikan agar mengakomodasi siswa disabilitas dengan fasilitas toilet dan tangga khusus.

Kerjasama dan bantuan yang diberikan oleh Australia untuk sektor pendidikan Indonesia tidak hanya diterapkan melalui AusAID, tetapi juga diwujudkan dengan program kerjasama lainnya. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Australia dan Indonesia dalam kerjasama di sektor pendidikan adalah *Technical Assistance for Education System Strengthening* (TASS). Program ini dilaksanakan agar dapat berkontribusi pada sistem pendidikan Indonesia dengan membawa perubahan berkelanjutan dalam kebijakan dan sistem pendidikan. Melalui suntikan dana sebesar AUD 11,98 juta, TASS menyediakan asistensi jangka pendek bagi pembuat kebijakan dan mendorong terciptanya kolaborasi antar *stakeholders*. Tidak hanya itu, TASS juga berjalan beriringan dengan program lainnya seperti *Improving Dimension of Teaching, Education Management, and Learning Environment* milik World Bank dan *Innovation for Indonesia's School Children* milik pemerintah Australia (Pelaksana, 2018).

Kerjasama lain terkait pendidikan yang dilakukan oleh Indonesia bersama dengan Australia adalah *Innovation for Indonesia's School Children* (INOVASI). Program INOVASI didesain untuk mencari tahu apa metode yang dapat diterapkan oleh guru dan siswa agar dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dimulai sejak tahun 2014, INOVASI diterapkan dengan berkolaborasi bersama pemerintah Indonesia dan *stakeholders* terkait melalui identifikasi perubahan yang dapat diterapkan di dalam sistem pendidikan Indonesia. Selain itu, INOVASI juga mengedepankan eksperimen dalam penerapan metode pembelajaran dan mengumpulkan timbal balik dari eksperimen tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya (Mahdalena & Daulay, 2020).

Ada beberapa hasil yang tercapai bagi pendidikan di Indonesia dari adanya kerjasama dengan Australia. Dari program-program bantuan yang diberikan oleh Australia melalui AusAID, capaian yang dipetik, antara lain adalah fasilitas konstruksi sekolah yang memiliki standar kualitas tinggi yang dibangun dengan baik, didukung oleh fungsi bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk apapun dan kapanpun. Selain itu, ProDEP yang merupakan bagian dari program bantuan pendidikan dari AusAID juga memiliki dampak dengan adanya penerapan modul dari ProDEP untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik. AusAID juga berkontribusi dalam



membantu replikasi model akreditasi C3 untuk sekitar 3.153 madrasah di seluruh Indonesia, ditambah dengan peningkatan kualitas di 2.000 madrasah di Jawa Tengah.

Program kerja sama Indonesia-Australia di luar AusAID juga menghasilkan beberapa capaian. Salah satunya adalah program INOVASI yang berhasil meningkatkan kapasitas kualitas guru dalam mengajar di berbagai provinsi. Tidak hanya itu, INOVASI juga menyumbang puluhan ribu buku untuk meningkatkan tingkat literasi siswa. Capaian tersebut didukung dengan dibentuknya ribuan fasilitator daerah di provinsi Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru (Penulis et al., 2018).

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian, peneliti menemukan hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Australia menciptakan berbagai bentuk kerja sama di berbagai bidang. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia, dibuktikan dengan kerja sama sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui AusAID dan upaya bantuan Australia untuk pendidikan di Indonesia yang menghasilkan berbagai capaian seperti tersedianya infrastruktur, akreditasi yang baik, pelatihan bagi tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan. Peneliti menemukan bahwa kerja sama pendidikan melalui AusAID dan upaya bantuan lainnya yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia merupakan bentuk perwujudan dari liberalisme. Hal ini disebabkan karena liberalisme percaya akan adanya kemajuan melalui kerja sama yang terjadi. Kepercayaan liberalisme sesuai dengan kerja sama Indonesia dengan Australia di sektor pendidikan yang memiliki motif untuk mencapai kemajuan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan Australia dan Indonesia di sektor pendidikan pada tahun 2014-2019 dapat dikatakan efektif. Jika dilihat melalui teori bilateral, kerja sama Australia dan Indonesia terkait pendidikan dilakukan dengan asistensi dan hibah. Australia memberikan asistensi terhadap Indonesia dalam meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan, guru, dan tenaga pendidik seperti kepala sekolah agar dapat mengembangkan sistem pembelajaran yang efektif bagi siswa. Selain itu, Australia juga memberikan hibah dengan bantuan pembangunan fasilitas sekolah dan buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya, agar dapat melihat capaian Kerjasama antara Indonesia dan Australia pada periode Jokowi yang kedua serta mampu menjelaskan lebih dalam tantangan yang dihadapi kedua negara dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia.

### Bibliografi

- Ahmad, Iqbal Faza, & Sukiman, Sukiman. (2019). Analisis higher order thinking skills (HOTS) pada soal ujian akhiAhmad, I. F., & Sukiman, S. (2019). Analisis higher order thinking skills (HOTS) pada soal ujian akhir siswa kelas 6 KMI dalam kelompok mata pelajaran Dirosah Islamiyah di Pondok Modern Taza. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 16(2), 137–164. <https://doi.org/10.14421/jpai.2019.162-02>
- Ansari, Rahmat, Utomo, Tri Cahyo, & Farabi, Nadia. (2016). Kerja sama bilateral indonesia dan australia dalam penanganan terorisme di indonesia tahun 2002–2013. *Journal of International Relations*, 2(1), 88–96.
- Armalena, Armalena, Syahrizal, Syahrizal, Yuherman, Yuherman, & Asril, Asril. (2021). Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Siswa Man Padusunan Kota Pariaman. *Menara Pengabdian*, 1(1). <https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.2704>
- ASRI, M., Rusmini, Rusmini, & Nugroho, Aris Dwi. (2021). *Manajemen Pengembangan Tenaga Pendidik Di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Wali Peetu Sadu Tanjung Jabung Timur*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Aurellia, Debby, Febriana, Yasinta D., & Salaeh, N. (2019). Program PetroCaribe sebagai Strategi Ekonomi Venezuela Era Presiden Nicolas Maduro. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 213–228.
- Daniah, Rahmah, & Apriani, Fajar. (2018). Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2). [10.22212/jp.v8i2.1140](https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140)
- Darmawan, Arief Bakhtiar, & Kuncoro, Hestutomo Restu. (2019). Penggunaan ASEAN Way dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan? *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019>
- Denimah, Denimah. (2021). *Peran kerjasama bilateral Australia-Indonesia melalui program MAMPU (kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan) dalam mendukung tercapainya Sustainable Development Goals di Indonesia tahun 2017-2020*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Farida, Eni. (2014). *Kerjasama Australia Indonesia Melalui AUSAID Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2009-2013*. Universitas Muhammadiyah Malang.

<http://eprints.umm.ac.id/25630/>

- Irawati, Eni, & Susetyo, Weppy. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Kristanto, Gladys Ariella, & Utomo, Tri Cahyo. (2020). Analisis Kepatuhan Australia dan Indonesia Terhadap Code of Conduct dalam Hubungan Indonesia–Australia Sebagai Konsekuensi Adanya Penyesuaian Tahun 2014-2019. *Journal of International Relations*, 6(4), 510–516.
- Ma'mun, Amung. (2014). Perspektif Kebijakan Pembangunan Olahraga dalam Era Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional di Indonesia. *ATIKAN*, 4(2). <https://doi.org/10.2121/atikan-journal.v4i2.13>
- Mahdalena, Mahdalena, & Daulay, Musnar Indra. (2020). Pengembangan Pembelajaran Fisika Berbasis Saintifik Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Komunikasi Verbal Siswa SMA. *Journal on Teacher Education*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.31004/jote.v2i1.903>
- Medan, Kota, Bebestari, Mitra, Harani, D. R.Prawidya, Syafrida Hani, S. E., Rahmat Fauzi, S. T., Sekretaris, M. T., Purba, Ir Netti Efridawati, Redaksi, Dewan, Triratih Handayani, S. H., & Sembiring, M. A. P.Edward. (2014). Volume 2 Nomor 2 Juli–Desember 2014. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(2).
- Murdiyana, Murdiyana, & Mulyana, Mulyana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 73–96.
- Naryoso, Agus. (2016). Model Public Relations untuk Pembangunan Reputasi Pendidikan Menengah sebagai Sekolah Rujukan Berprestasi Berpotensi. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.32>
- Patuju, Ahmad. (2018). *Hubungan Sikap Terhadap Resiko Bencana Kebakaran dengan Kesiapsiagaan Menghadapi Kebakaran di PemukimanKelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu*.
- Pelaksana, Redaktur. (2018). Jurnal Institut Bpjs Ketenagakerjaan. *Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Volume*, 3(1).
- Penulis, Andi Amran Sulaiman, Subagyono, Kasdi, Alimansyah, Trip, Noor, Mohammad, Muharam, Agus, Suwastika, I.Wayan, & Subiksa, I. (2018). *Membangkitkan lahan rawa, membangun lumbung pangan Indonesia*. IAARD

Press.

- Pramitha, Dewi Adithyanti. (2017). Diplomasi Pertahanan Indonesia dengan Australia dalam Hubungan Comprehensive Partnership di Bidang Keamanan Maritim. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 3(2). <https://doi.org/10.33172/jdp.v3i2.86>
- Pratiwi, Citra Ayu. (2021). Kerjasama Bilateral Indonesia Denmark dalam Circular Economy dan Manajemen Pengolahan Sampah Tahun 2018-2019. *Moestopo Journal of International Relations*, 1(2), 127–136.
- Pujayanti, Adirini. (2016). Kerja sama Selatan-Selatan dan manfaatnya bagi Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.22212/jp.v6i1.300>
- Ramadhana, Aulia, & Tanjung, Irwan Syari. (2021). *Opini Komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap Pemberitaan WacRamadhana, A., & Tanjung, I. S. (2021). Opini Komunitas GenPI Sumatera Utara terhadap Pemberitaan Wacana Penerapan Wisata Halal di Objek Wisata Danau Toba. UMSU.ana Penerapan Wisata Halal di Obj. UMSU.*
- Saggaf, H. M.Said. (2016). KebSaggaf, H. M. S. (2016). Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Dalam Memperkuat Karakter Bangsa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 106–112. <https://doi.org/10.26858/jiap.v5i2.1762>
- Saragih, Hisarma, Manullang, Sardjana Orba, Soetijono, Irwan Kurniawan, Hamidah, Siti, Triono, Triono, Bintarawati, Fenny, Mustar, Mustar, Hermawansyah, Ady, Irawan, Rudi, & Prijanto, Jossapat Hendra. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan. Yayasan Kita Menulis.*
- Sardjunani, Nina. (2014). *Studi ketidakhadiran guru di Indonesia 2014.*
- Soepandji, Kris Wijoyo. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436–456. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>
- Solichin, Mujianto. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Subchi, Imam, & Halid, M.Ag. (2018). *Sejarah Kementerian Agama Era Reformasi: Dari Kebijakan Agama Masa Transisi Hingga Konsolidasi Demokrasi.* Rajawali Press.

- Sunarti, Linda. (2016). Sejarah Indonesia Dalam Konteks Politik Global Dan Regional. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 10(2), 161–173. <http://dx.doi.org/10.17977/sb.v10i2.7668>
- Syafii, Ahmad. (2018). Perluasan dan pemerataan akses kependidikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 153–171.
- Triputra, Yuli Asmara. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Vita Indah, Pangestika. (2021). *Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah*. IAIN Purwokerto.